

# “Mereka yang tidak mengingat masa lalu ditakdirkan untuk mengulanginya”

Janji “tidak pernah lagi”, yang lahir dari abu Holocaust, telah menjadi landasan hukum hak asasi manusia internasional dan kesadaran moral global. Namun, seperti yang diperingatkan George Santayana dalam kutipan yang menjadi judul esai ini, kesamaan antara kejahatan masa lalu dan krisis saat ini mengungkapkan kesinambungan yang mengganggu dalam ideologi yang memicu genosida dan kegagalan sistemik yang memungkinkannya. Esai ini mengeksplorasi kesamaan ini melalui tiga bab: pertama, peran superioritas dan dehumanisasi dalam Holocaust dan kegagalan lembaga internasional seperti Liga Bangsa-Bangsa dan Pengadilan Internasional Tetap (PCIJ) untuk mencegah atau menghentikannya; kedua, kemiripan yang mencolok dalam sikap Israel terhadap Arab, khususnya Palestina, dan tindakannya di Gaza; dan ketiga, bukti kuat **niat jahat** (*mens rea*) dan **tindakan kriminal** (*actus reus*) yang menetapkan genosida di Gaza, menegaskan kewajiban moral dan hukum negara dan pejabat untuk bertindak sesuai dengan janji “tidak pernah lagi”, Konvensi Genosida, dan doktrin Tanggung Jawab untuk Melindungi (R2P).

## Superioritas, Dehumanisasi, dan Kegagalan Lembaga Internasional

Holocaust, salah satu genosida paling sistematis dalam sejarah, didukung oleh ideologi superioritas rasial dan dehumanisasi yang membenarkan pemusnahan enam juta Yahudi dan jutaan lainnya. Ideologi Nazi, yang berakar pada konsep superioritas Aryan, menggambarkan Yahudi sebagai ancaman submanusia bagi bangsa Jerman. Propaganda menggambarkan mereka sebagai “hama”, “parasit”, dan “musuh rasial”, mencabut kemanusiaan mereka dan memudahkan penghancuran sistematis mereka. Dehumanisasi ini bukan tindakan spontan, melainkan strategi yang disengaja, seperti terlihat dalam pidato Hitler dan propaganda Goebbels, yang membingkai Yahudi sebagai ancaman eksistensial yang memerlukan eliminasi untuk kelangsungan hidup Jerman.

Rezim Nazi mengkonsentrasikan Yahudi di ghetto seperti Warsawa, di mana kelaparan dan penyakit membunuh puluhan ribu orang, sebelum mereka dideportasi ke kamp pemusnahan seperti Auschwitz untuk pembunuhan terindustrialisasi melalui kamar gas. Niat untuk menghancurkan Yahudi sebagai kelompok diungkapkan secara eksplisit dalam “Solusi Akhir”, memenuhi **niat jahat** untuk genosida, sementara tindakan—pembunuhan, menyebabkan kerusakan parah, memaksakan kondisi mematikan, mencegah kelahiran melalui sterilisasi, dan membunuh 1,5 juta anak—an memenuhi **tindakan kriminal** menurut Konvensi PBB tentang Genosida (1948).

Lembaga internasional, khususnya Liga Bangsa-Bangsa dan PCIJ, gagal mencegah atau menghentikan genosida ini karena kelemahan struktural dan realitas geopolitik. Liga, yang didirikan pada 1920 untuk menjaga perdamaian, kekurangan mekanisme penegakan dan bergantung pada keputusan bulat, memungkinkan kekuatan besar seperti Prancis dan Inggris untuk memprioritaskan penenangan Jerman Nazi daripada intervensi. Konferensi Evian (1938), yang didukung Liga, gagal menangani krisis pengungsi Yahudi, karena sebagian besar negara menolak menerima pengungsi, sehingga memungkinkan kekejaman Nazi. PCIJ, cabang yudisial Liga, dapat menyelesaikan sengketa antar negara, tetapi tidak memiliki mandat atau kekuatan untuk menangani kekejaman internal seperti Holocaust, mencerminkan prioritas kedaulatan atas hak asasi manusia pada era itu. Ketika skala penuh Holocaust diketahui, Liga telah bubar, dan dunia sedang berperang, menyoroti kegagalan bencana mekanisme internasional untuk melindungi populasi rentan.

## **Kesamaan dalam Sikap Israel terhadap Arab dan Tindakannya di Gaza**

Sikap Israel terhadap Arab, khususnya Palestina, dan tindakannya di Gaza mengungkapkan kemiripan yang mengerikan dengan Holocaust, yang berakar pada ideologi superioritas, dehumanisasi, dan kekerasan sistematis. Pernyataan historis dari pemimpin Israel menunjukkan niat jangka panjang untuk mengecualikan atau menghancurkan Palestina. Yosef Weitz (1940-an) menyerukan “tanah Israel... tanpa Arab”, mengadvokasi “pemindahan” semua Palestina, tanpa meninggalkan “satu desa, satu suku”. Menachem Begin (1982) mengklaim orang Yahudi sebagai “ras unggul”, melabeli ras lain sebagai “binatang dan hewan, paling baik ternak”, menggemakan superioritas Aryan Nazi. Rafael Eitan (1983) membayangkan Palestina sebagai “kecoa yang diberi obat bius dalam botol” setelah tanah dikolonisasi, mendehumanisasi mereka seperti propaganda Nazi. Baru-baru ini, Pawai Bendera Yerusalem (2023) melihat ribuan orang meneriakkan “Mati untuk Arab” dan “Semoga desamu terbakar”, sementara konferensi pemukim pada 2024 merencanakan “menetap di Gaza”, membayangkan masa depan “tanpa Hamas”—dan secara implisit tanpa Palestina. Selain itu, Menteri Warisan Amichai Eliyahu menyatakan pada November 2023 bahwa salah satu opsi Israel dalam perang melawan Hamas bisa jadi “menjatuhkan bom nuklir di Jalur Gaza”, sebuah pernyataan yang, meskipun ditolak oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mencerminkan retorika ekstrem pemusnahan yang diulang dalam banyak seruan untuk penghancuran total Gaza, baik di media sosial maupun di tempat lain.

Sikap ini diterjemahkan ke dalam tindakan di Gaza yang mencerminkan taktik Nazi. Gaza, dengan 2,1 juta orang yang terkurung di 365 kilometer persegi di bawah blokade sejak 2007, menyerupai ghetto Nazi, kini berubah menjadi apa yang dapat digambarkan sebagai “kamp pemusnahan besar”. Sejak Oktober 2023, kampanye Israel telah membunuh lebih dari 40.000 Palestina, termasuk 15.000 anak, melalui pemboman, menurut otoritas kesehatan Gaza (akhir 2024). Pengepungan total selama dua bulan (hingga Mei 2025), yang dikonfirmasi oleh Israel Katz (“tidak ada bantuan kemanusiaan yang akan masuk ke Gaza”) dan Bezalel Smotrich (“tidak sebutir gandum”), telah

menyebabkan kelaparan, dengan 1,1 juta orang berisiko kelaparan dan anak-anak meninggal karena kekurangan gizi, menurut laporan PBB (2024). Penghancuran infrastruktur—70% perumahan, sebagian besar rumah sakit—menciptakan kondisi yang tidak dapat dihuni, sementara penggunaan fosfor putih dikaitkan dengan cacat lahir, menurut Human Rights Watch (2023). Di Tepi Barat, yang digambarkan sebagai “ghetto” dengan pos pemeriksaan dan pemukiman, 83 anak dibunuh pada 2023, dua kali lipat dari total tahun sebelumnya, di tengah operasi militer yang meningkat, menurut UNICEF.

Sebuah artikel di The Times of Israel pada 2024 yang menyerukan “lebensraum” di Tepi Barat untuk mengakomodasi populasi Israel yang tumbuh (15,2 juta pada 2040) secara langsung mencerminkan ambisi teritorial Nazi, yang membenarkan genosida untuk membebaskan ruang bagi pemukim Jerman. Pernyataan pejabat Israel, seperti “hewan manusia” oleh Yoav Gallant (2023) dan dokumen parlemen yang meminta IDF untuk “membunuh siapa saja yang tidak mengibarkan bendera putih” (2025), mendehumanisasi dan menargetkan Palestina secara sembarangan, seperti kebijakan Nazi menargetkan Yahudi. Komentar tambahan Smotrich pada November 2023 bahwa Israel akan mengendalikan Gaza setelah perang menunjukkan rencana jangka panjang untuk menghilangkan kehadiran Palestina, sejalan dengan visi konferensi pemukim dan seruan historis untuk tanah tanpa Arab. Kekerasan sistematis ini, yang dimungkinkan oleh pengurungan yang sudah ada sebelumnya di Gaza dan Tepi Barat, mencerminkan penggunaan ghetto dan kamp oleh Holocaust untuk mengisolasi dan menghancurkan.

## Bukti Genosida di Gaza dan Kewajiban Global untuk Bertindak

Bukti di Gaza menetapkan baik **niat jahat** maupun **tindakan kriminal** untuk genosida menurut Konvensi PBB tentang Genosida dan Statuta Roma, memaksa negara dan pejabat untuk bertindak sesuai dengan janji “tidak pernah lagi”, Konvensi Genosida, dan doktrin R2P.

**Niat Jahat:** Niat untuk menghancurkan Palestina di Gaza terlihat jelas dalam pola retorika yang mendehumanisasi dan kebijakan eksplisit. Pernyataan historis (Weitz, Begin, Eitan) menetapkan preseden untuk pengecualian, sementara pernyataan kontemporer mengkonfirmasi niat ini dalam tindakan: “hewan manusia” Gallant, “tidak sebutir gandum” Smotrich, “tidak ada bantuan kemanusiaan” Katz, dan “Mati untuk Arab” dari Pawai Bendera, semuanya membingkai Palestina sebagai kelompok yang harus dihancurkan. Rencana konferensi pemukim untuk Gaza “tanpa Hamas”—dan secara implisit tanpa Palestina—sejalan dengan banyak seruan untuk pemusnahan total Gaza, baik di media sosial maupun di tempat lain, seperti saran Eliyahu pada 2023 untuk “menjatuhkan bom nuklir di Jalur Gaza”. Pernyataan Smotrich bahwa Israel akan mengendalikan Gaza setelah perang lebih lanjut menunjukkan visi untuk menghilangkan kehadiran Palestina sepenuhnya. Ketidakpatuhan Israel terhadap tindakan Mahkamah Internasional (ICJ) pada 2024, yang memerintahkan akses bantuan untuk mencegah genosida, lebih lanjut menghubungkan tindakan ini dengan niat, menunjukkan pilihan yang disengaja untuk memperburuk kondisi mematikan.

**Tindakan Kriminal:** Tindakan Israel memenuhi beberapa tindakan genosida: (1) **Pembunuhan:** 40.000 kematian di Gaza, 83 anak di Tepi Barat (2023); (2) **Kerusakan Parah:** Pemboman, cedera, trauma, dan paparan bahan kimia (fosfor putih); (3) **Kondisi Hidup:** Pengepungan, kelaparan, dan penghancuran infrastruktur, menciptakan kondisi yang tidak dapat dihuni; (4) **Pencegahan Kelahiran:** Keguguran dan kerusakan reproduksi akibat kekurangan gizi dan bahan kimia; (5) **Pemindahan Anak:** Pembunuhan 15.000 anak di Gaza, 83 di Tepi Barat (“pemindahan ke kuburan”). Serangan Pawai Bendera dan kekerasan di Tepi Barat menambah pola ini, menunjukkan kampanye sistematis di seluruh wilayah.

Bukti ini memenuhi ambang hukum untuk genosida, karena ICJ (2024) menemukan risiko yang masuk akal dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Netanyahu dan Gallant untuk kejahatan perang, termasuk menggunakan kelaparan sebagai metode perang. Kesamaan dengan Holocaust—ideologi supremasi, dehumanisasi, konsentrasi, dan pembunuhan sistematis—menegaskan keseriusan krisis. Komentar Eliyahu tentang bom nuklir, meskipun ditolak, mencerminkan retorika ekstrem yang, bersama dengan visi Smotrich tentang kendali pasca-perang, menunjukkan kesiapan untuk mempertimbangkan penghancuran total, lebih lanjut membuktikan niat genosida. Namun, lembaga internasional gagal lagi: PBB lumpuh oleh veto AS, putusan ICJ tidak dapat ditegakkan, dan surat perintah ICC kekurangan kekuatan eksekusi, mencerminkan kegagalan Liga Bangsa-Bangsa selama Holocaust.

Sesuai dengan janji “tidak pernah lagi”, yang lahir dari pelajaran Holocaust, Konvensi Genosida (Pasal I mewajibkan negara untuk mencegah dan menghukum genosida), dan doktrin R2P (negara harus melindungi populasi dari genosida, dengan intervensi internasional jika gagal), setiap negara dan pejabat memiliki kewajiban moral dan hukum untuk bertindak. Ini termasuk memberlakukan sanksi, menghentikan bantuan militer untuk Israel (misalnya, \$17 miliar dari AS sejak 2023), menegakkan surat perintah ICC, dan mendukung intervensi kemanusiaan untuk mengakhiri pengepungan dan pemboman. Tidak bertindak mengulangi kesalahan Liga Bangsa-Bangsa, mengkhianati janji untuk melindungi kemanusiaan dari genosida.

---

## Kesimpulan

Holocaust dan Gaza mengungkapkan kesinambungan tragis dalam ideologi superioritas dan dehumanisasi yang memicu genosida, dan kegagalan sistemik lembaga internasional yang memungkinkannya. PBB, ICJ, dan ICC, yang lumpuh oleh politik kekuatan besar dan norma kedaulatan, gagal menghentikan tindakan Israel di Gaza, yang didukung oleh sejarah retorika supremasi dan niat untuk mengusir Palestina. Bukti **niat jahat** dan **tindakan kriminal**, yang diperkuat oleh pernyataan ekstrem seperti saran Eliyahu tentang pemusnahan nuklir dan visi Smotrich tentang kendali pasca-perang, menetapkan genosida tanpa keraguan yang masuk akal. Kewajiban komunitas global di bawah “tidak pernah lagi”, Konvensi Genosida, dan R2P menuntut tindakan segera untuk menghentikan kekejaman di Gaza, agar sejarah tidak mengulangi bab-bab tergelapnya. Janji “tidak pernah lagi” harus lebih dari sekadar kata-kata—itu harus menjadi panggilan untuk bertindak demi keadilan, perlindungan, dan kemanusiaan.